

LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN NATIONALS WHO DO NOT COMPLETE
IMMIGRATION DOCUMENTS.

Jindan Maulana Aldi

Faculty of Law

Contributor :

Suhariwanto, S.H., M.Hum

Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Article 1 point 14 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration stipulates that immigration documents are travel documents of the Republic of Indonesia and residence permits issued by immigration officials or foreign service officials. Immigration documents are used as a form of fulfilling the requirements for permits to enter the territory of the Indonesian state and as a form of supervision by the state against foreign nationals. In reality, it is found that there are many foreign nationals who are in the territory of Indonesia but do not complete the immigration documents according to what has been determined. This research is intended to analyze what legal actions can be taken by TIM PORA as a TIM formed to oversee all the existence and activities of foreign nationals in the territory of Indonesia in order to enforce law against foreign nationals who do not fulfill immigration documents, reviewed based on The 1945 Constitution, Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 50 of 2016 concerning the Alien Monitoring Team, relevant laws and regulations, and concepts of immigration law. When reviewing the laws and regulations and concepts of immigration law, legal action that can be taken includes searching for information on foreign nationals to be submitted to law enforcement officials as the party that will secure the foreign nationals.

Keywords: *Immigration Law, Legal Action, Foreign Nationals, and TEAM PORA.*

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK
MEMENUHI DOKUMEN KEIMIGRASIAN.

Jindan Maulana Aldi

Fakultas Hukum

Pembimbing :

Suhariwanto, S.H., M.Hum

Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Dokumen keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dokumen keimigrasian digunakan sebagai bentuk pemenuhan persyaratan izin masuk ke wilayah negara Indonesia dan sebagai bentuk pengawasan oleh negara terhadap warga negara asing. Namun pada realitanya, banyak ditemukan warga negara asing yang berada di wilayah negara Indonesia namun tidak melengkapi adanya dokumen keimigrasian yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh TIM PORA selaku TIM yang dibentuk untuk mengawasi segala keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang ada di wilayah negara Indonesia dalam rangka penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak memenuhi dokumen keimigrasian, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta konsep-konsep hukum keimigrasian. Apabila meninjau dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum keimigrasian, tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah meliputi pencarian informasi warga negara asing untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum selaku pihak yang akan mengamankan warga negara asing tersebut.

Kata kunci: *Hukum Keimigrasian, Tindakan Hukum, Warga Negara Asing, dan TIM PORA.*